

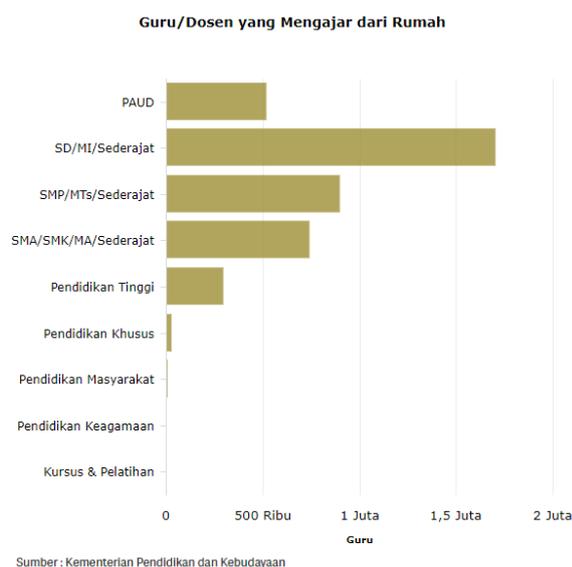
# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pandemi COVID-19 cukup mempengaruhi seluruh sektor Indonesia. Seluruh kegiatan masyarakat secara langsung diminta untuk diberhentikan sejenak guna mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19. Berlangsungnya kegiatan pendidikan secara tatap muka seperti pada umumnya telah di gantikan dengan kegiatan daring yang dapat melalui aplikasi zoom atau google meeting di kediaman masing-masing (Kelana, 2020). Dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan Nomor 4 tahun 2020, telah di jelaskan bahwasannya pelaksanaan pendidikan di masa darurat ini dilaksanakan guna menekan penyebaran COVID-19 yang meliputi kegiatan belajar mengajar, ujian nasional, kenaikan kelas, dan penerimaan peserta didik baru dapat di laksanakan secara daring (dalam jaringan) mengingat kondisi genting yang tidak memungkinkan untuk pengadaan kegiatan di sekolah masing-masing. Pembelajaran daring ini bertujuan agar anak-anak bangsa tetap mendapatkan pendidikan yang layak meski sedang di landa bencana wabah ini. Kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu dari bagian dari pendidikan yang di laksanakan antara tenaga pendidik dengan peserta didik.

Adapun tujuan lain dari pembelajaran sistem daring ini ialah menciptakan anak bangsa yang kreatif, mandiri, dan mengurangi gagap teknologi dalam dunia pendidikan sehingga mereka mampu berpikir secara kritis dan empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah yang ada di dalam dirinya (Setyorini, 2020). Berikut ialah grafik pelaksanaan KBM melalui sistem daring di Indonesia pada masa Pandemi COVID-19 yang dilaksanakan oleh staf pengajar :



Sumber : <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/berita/5f50ebddd0f80/masalah-berlapis-sekolah-daring-yang-tak-selesai-lewat-subsidi-pulsa>

Menurut Drago (2004), kegiatan pendidikan secara online dapat menguatkan kemampuan siswa dalam gaya belajar yang terkait visual dan baca tulis agar lebih efektif dan efisien mengingat untuk saat ini generasi muda kian aktif dengan gadget dan media elektronik di kehidupan sehari-hari. Minimnya kegiatan luar ruangan di masa pandemi ini juga mampu membuat peserta didik merasa bosan di rumah lantaran tidak memiliki kegiatan positif layaknya hari-hari normal sebelumnya, untuk itu pembelajaran daring atau online berupa tatap muka dan tugas virtual di harapkan mampu mengisi kekosongan waktu tanpa meninggalkan kewajiban pendidikan (Kaler, 2012).

Pada Kota Yogyakarta, pelaksanaan pendidikan secara daring telah di mulai sejak tanggal 23 Maret 2020 yang memiliki teknis pembelajaran melalui e-learning, aplikasi Jogja Belajar, Google Classromm, Google School, dan website Konsultasi Belajar dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kegiatan belajar mengajar di rumah ini bukan berarti siswa mendapatkan libur begitu saja, hanya saja melaksanakan aktivitas seperti biasa di rumah mengingat kewajiban PSBB di masa pandemi ini. Siswa diwajibkan mengikuti jam pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan serta

menggunakan seragam saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka virtual. Pemberian informasi pun di lakukan pada grup Whatsapp kelas yang telah tersedia sebelumnya (Suci, 2020).

Meski dianggap efektif di tengah pandemi COVID-19 ini, akan tetapi pelaksanaan pembelajaran daring di Kota Yogyakarta pun memiliki kendala yang cukup serius bagi peserta didik yang tidak memiliki fasilitas memadai seperti halnya alat penunjang pembelajaran daring yakni gadget atau laptop dan akses internet, pasalnya tidak semua siswa di Kota Yogyakarta memiliki keluarga dengan perekonomian yang baik sehingga mereka mau tidak mau untuk mengesampingkan kegiatan sekolah daring disaat Pandemi COVID-19 ini. Ditambah lagi orang tua siswa yang belum bisa mendampingi anak-anaknya untuk sekolah online sebab kesibukan mereka yang di tuntut untuk bekerja di tengah wabah ini mengakibatkan beberapa siswa tidak terlalu memahami pentingnya sekolah bersistem daring ini. Permasalahan lain pun juga muncul di kalangan pengajar yakni guru-guru yang melakukan pembelajaran secara Daring sebab semakin bertambahnya usia menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam menguasai kegiatan belajar mengajar secara online. Hambatan tersebut relative rendah untuk guru-guru yang berusia di bawah 35 tahun (Jiwandono, 2020).

Timbulnya pro dan kontra dari pelaksanaan kegiatan pendidikan secara daring di masa Pandemi COVID-19 ini cukup menimbulkan kebingungan bagi masyarakat khususnya guru dan siswa yang terlibat, terlebih apabila mereka tidak memiliki penunjang pelaksana kegiatan sehingga tidak menutup kemungkinan bila pengimplementasian program pendidikan mengenai kurikulum darurat di masa seperti ini dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, peran pemerintah Kota Yogyakarta khususnya pada Dinas Pendidikan juga mempengaruhi bagaimana program KBM secara daring dimasa Pandemi COVID-19 ini berjalan. Tidak hanya itu, pemerintah Kota Yogyakarta juga merupakan salah satu dari bagian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penanggung jawab sebab kebijakan yang dibentuk pada Kota Yogyakarta mengenai sistem pembelajaran untuk saat ini sangatlah mempengaruhi kondisi tenaga pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu, peneliti hendak megulas dan memaparkan perihal implementasi kegiatan belajar mengajar secara daring di Kota

Yogyakarta pada masa pandemi COVID-19 yang tertulis dalam penelitian berjudul “Implementasi Kegiatan Belajar Mengajar Daring pada masa Pandemi COVID-19 di Kota Yogyakarta”. Peneliti memilih Kota Yogya sebagai lokasi penelitian sebab masih banyaknya pelajar atau peserta didik yang mengalami hambatan pembelajaran secara daring di Kota Yogyakarta meski kota ini terbilang sebagai kota pelajar namun kesulitan sistem pembelajaran sehingga mengakibatkan sektor pendidikan di Kota Yogyakarta harus dialihkan dengan cara lain yang ternyata masih memelihara hambatan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta akibat berlakunya “belajar dari rumah” di saat masa Pandemi COVID-19.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kegiatan belajar mengajar daring pada masa Pandemi COVID-19 bagi pelajar SMP dan SMA di Kota Yogyakarta ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kegiatan belajar mengajar daring pada masa Pandemi COVID-19 bagi pelajar SMP dan SMA di Kota Yogyakarta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui implementasi kegiatan belajar mengajar daring pada masa Pandemi COVID-19 di Kota Yogyakarta Daring pada masa Pandemi COVID-19
2. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kegiatan belajar mengajar daring pada masa Pandemi COVID-19 di Kota Yogyakarta.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Apabila dilihat secara teoritis, manfaat dari penelitian ini ialah agar mampu memberikan pengetahuan kepada pihak lain tentang dampak dari kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan pendidikan secara daring atau online di Kota Yogyakarta pada masa Pandemi COVID-19 serta memaparkan informasi mengenai faktor pendorong dan penghambat dari pelaksanaan sistem tersebut. Manfaat lain yang timbul, yakni mengembangkan metode keilmuan yang penulis terima saat mempelajari sistem implementasi kebijakan publik.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini ialah memberikan pandangan dan bukti konkret mengenai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar melalui daring semasa pandemi COVID-19 di Kota Yogyakarta sebagai bentuk antisipasi dan penanganan penyebaran wabah penyakit serta memaparkan keberhasilan dan kegagalan dari program yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan tersebut.

## E. Kajian Pustaka

Jurnal Penelitian	Penulis	Isi	Temuan Riset
Implementasi Program Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Negeri Lawanggintung 01 Kota Bogor. JPP GUSED, Vol. 2, No.1.	(Pertiwi, Suchyadi, Sumardi, & Handayani, 2019)	Perencanaan pendidikan yang berbasis karakter mampu dimulai dengan melaksanakan analisa pada kondisi serta potensi pada sekolah yang di laksanakan secara religius, mandiri, nasionalis, dan disiplin sehingga murid mampu untuk menghargai prestasi, lingkungan, dan kompetensi dasar	Temuan riset yang di dapatkan peneliti dalam penelitian ini ialah tidak di jelaskannya bagaimana implementasi pendidikan yang berbasis karakter beserta hasil yang di peroleh dari proses

		<p>sesuai kemampuan individual melalui pendidikan karakter yang terprogram di sekolah sebagai tempat untuk menerima pendidikan yang diberikan oleh tenaga pendidik. Pendidikan akan terbilang sukses apabila pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan implementasi yang sesuai</p>	<p>pembelajaran dengan berbasis karakter. Adapun pembaruan yang di tetapkan peneliti ialah perlunya pendidikan secara akademis yang di tunjang dengan pendidikan karakter di masa pandemi COVID-19 ini.</p>
<p>Implementasi Program Pendidikan Karakter Berbasis Hidden Curriculum DI MI Muhammadiyah 1 Pare Kediri. Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan, Vol. 7, No.1.</p>	<p>(Yolanda, 2019)</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan pendidikan dapat di laksanakan melalui berbagai kegiatan di luar kelas yakni dengan meningkatkan pembelajaran melalui aktivitas yang mampu mengasah kemampuan peserta didik agar mereka memiliki pengetahuan lain yang mampu me bawa peserta didik mengasah, mengendalikan, dan memahami situasi di luar lingkup sekolah. Adapun implementasi kegiatan pendidikan ini disebut sebagai <i>hidden curriculum</i></p>	<p>Pendidikan hidden curriculum hanya terfokus pada pendidikan di luar akademis pendidikan yang di laksanakan di luar sekolah. Akan tetapi dalam penelitian ini tidak menjelaskan bagaimana hidden curriculum apabila di laksanakan pada kondisi wilayah darurat seperti halnya di masa</p>

			<p>Pandemi COVID-19. Maka dari itu peneliti hendak mengkaji bagaimana keberadaan hidden curriculum apabila di laksanakan secara daring di masa Pandemi COVID-19.</p>
<p>Implementasi Hybrid Learning Menggunakan Aplikasi EMODO Pada Mata Kuliah Penelitian Kuantitatif. Jurnal Elementeris, Vol. 1, No.1.</p>	<p>(Sulistino, 2019)</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan belajar secara online atau daring bagi sebagian peserta didik memang di anggap efektif, akan tetapi tidak di pungkiri pula bahwa pelaksanaan tersebut memberikan kesan sulit bagi beberapa pihak pasalnya segala pelaksanaan di lakukan secara online dengan mengirimkan file atau data terhadap tenaga pendidik. Untuk memudahkan peserta didik, terdapat E-Learning atau laman daring bagi peserta didik untuk menerima pembelajaran serta penugasan tanpa harus bertemu secara tatapmuka. Hal ini dapat di anggap mudah apabila pelaksana berada di kejauhan dari</p>	<p>Penelitian ini belum menjelaskan bagaimana kesulitan yang di hadapi peserta didik mengenai penggunaan aplikasi tersebut sebagai wadah pengganti pengumpulan tugas atau pembelajaran lainnya</p>

		tempat pendidikan yang mereka tempuh.	
Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi COVID-19. Jurnal Adalah, Vol. 4, No.1	(Pujilestari, 2020)	Program pendidikan daring sangatlah bermanfaat dimasa pandemi COVID-19 ini mengingat penyebaran virus yang dapat ditularkan antar individu melalui sentuhan dan udara mampu mengakibatkan seluruh kegiatan pendidikan di laksanakan di kediaman masing-masing tanpa harus bertemu secara tatap muka. Pada kondisi yang terbilang darurat ini, kegiatan pembelajaran secara daring cukup membantu peserta didik untuk tetap mendapatkan ilmu dengan memanfaatkan fasilitas yang mereka miliki.	Penelitian ini hanya membahas bagaiman dampak positif dari pembelajaran daring, Hal ini yang menjadi pendukung bagi penelitian yang akan di bentuk peneliti tentang dampak dan faktor pendukung juga penghambat pelaksanaan KBM secara daring.
Dampak COVID-19 terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 2, No.1	(Dewi, 2020)	Pembelajaran secara daring dapat berjalan secara efektif apabila terdapat kerjasama antara tenaga pendidik dengan peserta didik. Adapun kerjasama tersebut dimasa pandemi COVID-19 ini ialah komunikasi secara rutin dan tepat yang disesuaikan dengan kebutuhan 2 pihak tersebut.	Penelitian ini hanya menjelaskan tentang efektifitas pembelajaran secara daring yang dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat komunikasi yang baik pula,

			akan tetapi peneliti dalam penelitian tersebut belum membahas mengenai apa saja yang dibutuhkan guna membangun komunikasi yang baik terhadap pembelajaran secara daring.
Efektifitas Implementasi Pembelajaran Daring (Full Online) di Masa Pandemi COVID -19 Pada Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Subang. Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang, Vol.6, No.1	(Hamdani & Priatna , 2020).	Pada penelitian ini pembelajaran secara daring di masa Pandemi COVID-19 terbilang belum efektif. Terdapat penilaian 66,97% dari 8 indikator penilaian efektifitas pembelajaran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ialah minimnya persiapan antara pihak pelaksana pendidikan, regulasi yang kuat, dan pengimplementasi pembelajaran	Penelitian ini telah menjelaskan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring di masa Pandemi COVID-19 ini, akan tetapi belum menerangkan solusi yang dibutuhkan dari keberadaan permasalahan pembelajaran daring. Maka dari itu, peneliti hendak mengkaji penelitian yang menerangkan solusi yang dibutuhkan untuk permasalahan

			pembelajaran secara daring.
--	--	--	--------------------------------

<p>Pendidikan Karakter Islami Pada Online Class Management di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Tarbiyatuna, Vol. 11, No.1</p>	<p>(Purnomo, Tumin, Mansir, &amp; Suliswiyadi, 2020)</p>	<p>Pembelajaran secara online yang di lakukan beberapa sekolah pada masa Pandemi COVID-19 ini masih mampu mengontrol sikap pelaksana pendidikan dalam mempertahankan kemampuan pendidikan berbasis karakter dan akademis yang mereka miliki. Sementara itu, kendala yang di hadapi oleh tenaga pendidik dan peserta didik ialah adaptasi dengan kelas yang dilaksanakan daring sebab belum terbiasanya hal tersebut untuk dilaksanakan.</p>	<p>Kekurangan dari penelitian ini ialah hanya menjelaskan kemampuan pendidikan melalui daring, akan tetapi tidak menjelaskan bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan secara daring yang semestinya berjalan. Oleh sebab itu pada penelitian selanjutnya peneliti hendak menjelaskan sistem pendidikan daring secara konkret.</p>
--	--	---	--

<p>Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. Edu Psy Couns, Vol.2, No.1.</p>	<p>(Purwanto, Pramono , Asbari , Wijayanti , Putri, &amp; Santoso , 2020)</p>	<p>Kendala yang di dapatkan dari pelaksana kegiatan belajar dan mengajar secara daring ialah penguasaan teknologi yang di butuhkan oleh pelaksa sebagai penunjang pembelajaran, selain itu terdapat pula penghambat seperti halnya keterbatasan fasilitas internet dan jaringan serta membengkaknya biaya kuota internet bagi pelaksana. Ketidak mampuan wali murid dalam membimbing anak mereka untuk melaksanakan pembelajaran di rumah juga mampu menghambat proses pembelajaran yang di laksanakan oleh peserta didik sehingga tercipta minimnya pengetahuan yang mereka serap.</p>	<p>Penelitian ini memang menjelaskan kendala sistem pembelajaran secara daring serta faktor penghambat dari pembelajaran , akan tetapi tidak menerangkan bagaimana solusi dan upaya yang harus dilaksanakan agar dapat meminimalisir kendala tersebut.</p>
--	---	---	--

<p>Implementasi Model Based Learning Berbantuan Multimedia di Sekolah Dasar. Jurnal Gentala Pendidikan Dasar, Vol.4, No.1</p>	<p>(Arsil, 2019)</p>	<p>Pembelajaran yang dilaksanakan secara daring melalui penerapan multimedia mampu meningkatkan kemampuan teknologi peserta didik sebab dapat dilaksanakan semenarik mungkin. Hal inilah yang dapat membangkitkan semangat peserta didik dalam proses kegiatan belajar. Pendidik juga berperan penting untuk refrensi yang kreatif dan inovatif sebab mereka perlu untuk memecahkan permasalahan yang di hadapi peserta didik serta memberikan keterangan lebih akurat atas pembelajaran yang mereka berikan.</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring melalui teknologi multimedia memang dapat membangkitkan semangat peserta didik, namun dalam penelitian ini hanya terpaku pada peserta didik yang memiliki fasilitas tersebut. Maka sebab itu pada penelitian yang akan di rancang peneliti kedepannya ialah mendalami tentang bagaimana kesulitan pembelajaran melalui teknologi multimedia khususnya di</p>
---	----------------------	---	---

			<p>masa pandemi seperti ini. Hal tersebut di karenakan permasalahan dapat muncul apabila terdapat peserta didik yang memiliki keterbatasan fasilitas. Alasan itu pula yang dapat menyebabkan semangat peserta didik menurun dalam menerima proses belajar dan mengajar.</p>
--	--	--	---

<p>Implementasi Blended Learning di Masa Pandemi COVID-19. Prosiding Diskusi Daring Tematik Nasional 2020.</p>	<p>(Budiyono, 2020).</p>	<p><i>Blended learning</i> merupakan sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara jarak jauh dengan menggunakan sarana dan prasarana teknologi seperti gadget atau laptop yang dapat memungkinkan untuk pendidik dan peserta didik dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti pada umumnya. Metod ini merupakan perpaduan metode pembelajaran tradisional dan modern yang kerap kali menjadi opsi ketika pendidik berhalangan hadir secara tatap muka. Akan tetapi di masa pandemi ini, basis pengajaran ini di gunkana guna menghindari penyebaran virus. Penerapan metode ini dapat berjalan dengan lancar apabila terdapat komunikasi dan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan orangtua. Alangkah baiknya pula jika orang tua dapat mendampingi anak-anak mereka dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan metode ini selama Pandemi COVID-19</p>	<p>Sistem pembelajaran jarak jauh yang di ulas dalam penelitian ini hanya mengulas bagaimana proses pembelajaran jarak jauh yang di padukan dengan metode tradisional dan modern. Akan tetapi penelitian ini belum memparkan segala kendala yang memiliki kemungkinan untuk menghambat pelaksanaan proses pembelajaran tersebut.</p>
--	--------------------------	--	--

		yang belum diketahui kapan berakhirnya.	
Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19. SALAM : Jurnal Sosial & Budaya Syar'i. Vol. 7. No.7	(Wadi, 2020)	Konstitusionalitas dari adanya kebijakan lockdown Covid-19 merupakan pelaksanaan otonomi daerah melalui perspektif konstitusional sesuai dengan kebijakan sebelumnya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan guna menangani wabah atau penyakit yang menular. Kondisi genting seperti ini tercipta pada masa pandemi covid-19 ini. Pemerintah pusat dan daerah menjadi agen yang menangani permasalahan di lingkungan masyarakat sebab dimilikinya kewenangan dan kewajiban yang tertuang dalam peraturan undang-undang.	Secara konstitusional dalam penelitian ini sudah membahas dan memaparkan tentang kebijakan penanganan Pandemi COVID-19 yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Namun pembaca belum menemukan bukti dari pelaksanaan lockdown diberbagai daerah sebab pada saat ini Pemerintah Daerah hanya menjelaskan dan menerangkan tentang pentingnya lockdown tanpa memberikan

			informasi mengenai masyarakat yang tidak melaksanakan lockdown sehingga kebijakan tanpa adanya masyarakat yang tidak melaksanakan lockdown mengakibatkan kesan yang kurang valid bagi masyarakat yang melaksanakan lockdown.
--	--	--	--

<p>Force Majeure dan Notoir Feiten atas Kebijakan PSBB Covid-19. Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6. No.1</p>	<p>(Sulfarina &amp; Wahyuni , 2020)</p>	<p>Pelaksanaan PSBB dimasa pandemi Covid-19 telah di atur dalam PP Nomor 21 tahun 2020, dalam kebijakan tersebut menjelaskan jika psbb merupakan salah satu upaya yang mampu mendominasi penekanan virus yang menyebar secara cepat dan massif ini. Meski dianggap efektif, peneliti dalam jurnal ini juga menjelaskan jika pelaksanaan psbb juga memberikan dampak yang negatif, yakni terganggunya aktivitas perekonomian masyarakat di Indonesia. Dari keberadaan regulasi tersebut, pemerintah diminta untuk tanggap pula terhadap adanya dampak dan memberikan upaya lain guna menekan ketimpangan perekonomian di berbagai daerah Indonesia. Peneliti memandang PSBB ini berdampak riskan karena menyebabkan permasalahan baru yang muncul di kehidupan masyarakat pada segala lapisan strata sosial baik menengah atas maupun bawah.</p>	<p>Penelitian ini memang sudah menjelaskan pentingnya lockdown dimasa Pandmei COVID, namun peneliti dalam penelitian tersebut belum menjelaskan secara valid mengenai upaya atau tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah guna menangani dampak dari PSBB didaerahnya sehingga pada penelitian yang akan dilakukan berikutnya akan menambahkan tentang penanganan yang dapat dilakukan dari adanya dampak</p>
--	---	---	--

			lockdown khususnya bagi sektor sosial dan ekonomi.
--	--	--	---

<p>Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Salam: Jurnal Sosial &amp; Budaya Syar'i. Vol. 7 No.7</p>	<p>(Nasruddin &amp; Haqq, 2020)</p>	<p>Penetapan PSBB di berbagai daerah Indonesia memiliki manfaat yang cukup praktis dan fungsional pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Hampir seluruh masyarakat menaati peraturan tersebut sebab persepsi pemutusan rantai wabah dapat di minimalisir dengan pengurangan aktivitas masyarakat. Meski memiliki manfaat yang cukup signifikan, akan tetapi pelaksanaan PSBB ini ternyata juga memberikan dampak yang sangat kuat bagi perekonomian masyarakat lantaran sebagian besar masyarakat mendapatkan penghasilan dengan berkegiatan di tempat umum. Dengan diadakannya PSBB di berbagai daerah yang mewujudkan berkurangnya masyarakat untuk membeli keperluan atau melaksanakan keperluan di luar rumah menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kekurangan pemasukan untuk memenuhi</p>	
---	-------------------------------------	---	--

		kehidupan sehari-harinya.	
--	--	---------------------------	--

<p>Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah sesuai Alamat UUD NRI 1945.</p> <p>Administrative Law &amp; Governance Journal, Vol. 3. No.2</p>	<p>(Ristyawati, 2020)</p>	<p>Kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar belum tentu terlaksana secara efektif sebab masih terdapat beberapa masyarakat yang menilai jika psbb belum terabsahkan di dalam UUD 1945. Adanya latar belakang lain yang mengakibatkan masyarakat belum mematuhi PSBB ialah peningkatan kebutuhan yang belum dapat di penuhi oleh masyarakat terutama di masa darurat seperti ini. Maka dari itu untuk menciptakan kondusifitas lingkungan publik pemerintah mencantumkan kejelasan yang di muat dalam suatu pernyataan, yakni di berikannya informasi secara terbuka mengenai pandemi covid-19 serta penanggulangannya di berbagai daerah. Hal ini dapat dilaksanakan dengan pemberlakuan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, sering mencuci tangan, menggunakan masker dan hand sanitizer. Kemudian, pemerintah menjamin adanya bantuan bagi</p>	<p>Permasalahan dalam penelitian ini jika di ulas belum begitu konkret karena belum menjelaskan bagaimana kebijakan belum bisa terlaksana dengan baik. Penulis cenderung membahas tentang kurang mampunya masyarakat dalam melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu pada penelitian yang nantinya akan di kemukakakan peneliti mengenai realisasi penanganan COVID—9 apakah berjalan</p>
---	---------------------------	---	---

		masyarakat sebagai wujud dukungan moral dan materi dalam menghadapi pandemi ini khususnya terhdap masyarakat menengah kebawah	sesuai tujuan dan sasaran atau bahkan tidak sama sekali.
--	--	---	--

<p>Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Kesehatan tentang Pencegahan Covid-19 di Indonesia. Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan. Vol. 11. No.2</p>	<p>(Sukaesih , Usman , Budi, &amp; Adkhana, 2020)</p>	<p>Pengetahuan mengenai pandemi ini perlu di tekankan secara berlanjut dan mendalam bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, khususnya bagi kaum mahasiswa. Menurut peneliti, pengetahuan dan sikap yang di berikan mahasiswa dalam menghadapi dan mengantisipasi diri dari Covid-19 yang mewabah ini dapat dijadikan contoh bagi masyarakat yang belum peka terhadap kondisi kesehatan yang masih menurun di negara ini. Oleh sebab itu, guna mencegah penyebaran virus, mahasiswa diminta untuk turut berpartisipasi dalam mengedukasi masyarakat perihal pentingnya menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan tidak bergerombol di keramaian saat pandemi seperti ini mengingat kaum mahasiswa ialah golongan terpelajar yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat lain yang minim akan pengetahuan mengenai covid-19.</p>	
---	---	--	--

Dari beberapa penelitian yang di cantumkan peneliti pada kajian pustaka maka dapat di ketahui bahwa pelaksanaan KBM secara daring masih terfokus pada pelaksanaannya saja, adapun penjabaran dari kendala yang di terima belum mendapatkan solusi yang logis. Oleh karena itu pada penelitian yang berjudul IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BELAJAR MENGAJAR DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA YOGYAKARTA ini, peneliti hendak mengulas faktor yang mempengaruhi dan upaya yang di butuhkan dalam menekan hambatan tersebut agar terdapat penekanan pada hambatan dalam pembelajaran secara daring yang akan di ulas pada bab selanjutnya mengenai pelaksanaan KBM di masa pandemi dengan berfokus pada pembentukan kegiatan, sasaran, tujuan, dan proses kegiatan sehingga dapat di temukannya solusi dan upaya dalam penanganan pembelajaran secara daring di masa Pandemi COVID-19. Pembaruan ini di karenakan penelitian sebelumnya seperti yang ada di kajian pustaka hanya ter fokus pada satu aspek dan tidak memberikan solusi dari pelaksanaan KBM daring di masa pandemi bagi tenaga pendidik dan peserta didik.

## **F. Kerangka Teori**

### 1) Kebijakan Publik

#### a. Pengertian Kebijakan Publik

Pada dasarnya konsep kebijakan publik merupakan suatu langkah yang diambil sebagai alternatif pemerintah terhadap lingkungan yang di kelola dalam menghadapi, mengantisipasi, dan

menyelesaikan permasalahan di dalam suatu negara atau daerah layaknya solusi dari permasalahan tersebut (Kambey, 2017). Kebijakan publik dapat di substansikan sebagai keputusan dari beberapa pilihan guna mewujudkan pencapaian tujuan yang dilatar belakangi oleh isu publik sehingga memerlukan keputusan agar mendapatkan penghasilan solusi (Tachjan, 2008). Menurut Iskandar (2012), pembentuk kebijakan publik terdapat rangkaian berupa rencana program, pelaksanaan program melalui aksi serta aktivitas yang di timbulkan, keputusan, serta sikap pembentuk saat menyelenggarakan kebijakan.

Pada kondisi tertentu, terdapat beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, seperti halnya penetapan pada tindakan penyelenggara kebijakan publik, bentuk nyata atau hasil yang di cetak dari kebijakan publik tersebut, kebijakan publik selalu di landasi oleh maksud dan tujuan tertentu, dan adanya kepentingan yang menyeluruh dari keberadaan kebijakan publik. Konteks kebijakan publik ini menjelaskan adanya hakekat berupa aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menciptakan keberlangsungan hidup masyarakat sesuai dengan cita-cita bersama (Islamy, 1994). Hal ini di setuju pula oleh Winarno (2002) jika klasifikasi kebijakan publik terbagi dalam dua kategori, yaitu sebagai tindakan pemerintah di sebuah kebijakan dan proses penyelesaian masalah dengan melakukan perumusan, pelaksanaan, dan penilaian.

Keberadaan kebijakan publik ternyata juga mampu dijadikan sebagai pilar dari adanya program yang dibentuk oleh pejabat publik dalam mengembangkan serta memperbaiki ketimpangan yang ada di masyarakat. Program pemerintah merupakan suatu bagian perencanaan yang akan ditindak lanjuti dengan upaya-upaya pendukung berdasarkan dengan kebijakan publik yang telah terbentuk sebelumnya (Aristora, 2019). Posisi kebijakan publik pada program yang di bentuk ialah sebagai penguat konstruksi jalannya program agar dapat berjalan sesuai dengan sifat yang dimiliki, yakni regulatif, ekstraktif, organisasional, dan lebih distributif. (Dye, 2005). Oleh karena itu, suatu program dapat berjalan dengan baik apabila kebijakan publik di gunakan sebagai kesungguhan pemerintah untuk bertindak secara relevan.

Disisi lain, Agustino (2008) menjelaskan perihal karakteristik utama dari kebijakan publik yang mengandung unsur kegiatan dari segala keputusan yang terpisah mengenai kesungguhan pemerintah dalam melakukan sesuatu baik bersifat positif atau pun negatif. Positif dan negatifnya kebijakan publik dapat di lihat dari perbandingan antara pengambilan keputusan dengan tindakan, dikatakan positif apabila pemerintah mampu memutuskan kebijakan beserta tindakan yang relevan. Namun, dikatakan sebagai sisi negatif jika keputusan tidak diimbangi dengan tindakan yang nyata. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, terdapat beberapa hal yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaannya, yakni (Solichin, 2008) :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusannya
  2. Tidak semua kebijakan dibedakan dari administrasinya
  3. Kebijakan mencakup harapan dan perilaku
  4. Kebijakan memiliki hasil akhir yang ingin dicapai
  5. Kebijakan memiliki tujuan tertentu yang tertera secara eksplisit maupun implisit
  6. Kebijakan diluruskan secara subjektif
- b. Indikator Kebijakan Publik

Menurut Harold Laswell, terdapat beberapa tolok ukur yang dapat dijadikan sebagai indikator dari kebijakan publik, adapun indikator tersebut ialah (Syafiie, 1992) :

1. Keputusan yang jelas
2. Kecenderungan atas isu atau permasalahan yang menjadi pusat perhatian pemerintah sehingga memerlukan kebijakan publik.
3. Kondisi dari lingkungan masyarakat saat isu publik tersebut muncul
4. Proyeksi keadaan kedepannya setelah adanya kebijakan publik tersebut muncul.
5. Hasil yang di berikan dari berlangsungnya kebijakan publik tersebut

Sementara menurut Howlet & Ramesh (1995), tahapan pada pembentukan kebijakan publik juga dapat dijadikan standar kesesuaian yang terdiri dari :

#### 1. Penyusunan agenda

Pada poin ini, pemerintah diminta agar mampu memusatkan perhatian masyarakat terhadap suatu kebijakan atas keberadaan isu publik sehingga membantu langkah awal pemerintah dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan publik kedepannya.

#### 2. Formulasi terhadap kebijakan

Pada tahap ini, tidak semua hal mengenai isu publik dijadikan sebagai kebijakan pemerintah. Pasalnya, pemerintah perlu memilah hal-hal apa saja yang pantas untuk di rumuskan kedalam kebijakan publik.

#### 3. Pembentukan kebijakan

Pembentukan kebijakan juga merupakan proses pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembentuk dan penyelenggara kebijakan. Pada tahap ini standar pemerintah dalam melakukan pengambilan keputusan sangatlah di perhatikan oleh masyarakat sehingga menimbulkan penafsiran kesesuaian atau tidak terhadap kondisi masyarakat.

#### 4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan ialah pelaksanaan kebijakan yang telah dibentuk sesuai dengan standar dan kebutuhan agar mencapai hasil yang kemudian di kelola pada evaluasi kebijakan.

#### 5. Evaluasi kebijakan

Pada tahapan akhir ini hasil dari pengimplementasian kebijakan akan di evaluasi dan dilakukan penilaian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan pengadaan dari kebijakan publik.

## 2) Implementasi Kebijakan

### a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan pelaksanaan peraturan oleh pemerintah atau seperangkat organisasi pemerintah terhadap permasalahan atau isu publik yang sebelumnya telah dirancang guna kepentingan umum (Anderson, 1975). Menurut Achmad (2016) implementasi ialah suatu kegiatan untuk melaksanakan sesuatu yang memiliki dampak kedepannya atau mencapai tujuan yang ada (Edwin Kambey, 2017). Implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja dilaksanakan untuk meraih kinerja yang tinggi, dimana selama proses itu berlangsung dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ialah faktor fisik, sosial, lingkungan, serta politik yang disasarkan terhadap kelompok agar dapat menerima manfaat dari pelaksanaan program yang telah dibentuk (Syukur, 1988). Pada konsep ini, implementasi juga dapat diartikan dengan segala tindakan yang dilaksanakan agar kebijakan mencapai tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya sehingga tercipta pelayanan publik yang sesuai dengan hakikat hukum yang berlaku. Pelaksanaan kebijakan ini dapat dilakukan dengan dua metode, yakni : *Pertama*, dilaksanakan dalam bentuk program. *Kedua*, melalui turunan dari kebijakan publik yang telah dibentuk sebelumnya (Sirajuddin, 2014).

Tujuan dari implementasi ialah memudahkan realisasi suatu kebijakan yang telah di formulasi sebagai bentuk hasil yang dikeluarkan pemerintah sebagai pembentuk kebijakan publik (Winarno, 2014). Implementasi ini dilaksanakan setelah adanya penerbitan perintah dari pihak yang berwenang mulai dari aspek pelaksana hingga dampak substansifnya bagi penerima kebijakan (Kurniawan, 2011). Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Van Meter dan Van Horn yang menjelaskan bahwa pemerintah ialah pejabat yang melaksanakan kebijakan sebagai landasan dari berjalannya suatu program beserta rakyatnya agar tercapai cita-cita dari kebijakan tersebut (Lusiana, 2018). Sebelum program di implementasikan, langkah baiknya

pembentuk kebijakan memaparkan konsekuensi yang di timbulkan dari implementasi kebijakan tersebut terhadap masyarakat agar tidak menjadi ketimpangan pertanyaan apabila kebijakan telah berjalan di kemudian hari (Djiko , Arimawa , & Tangkau , 2018).

## b. Konsep Implementasi Kebijakan

### 1. Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

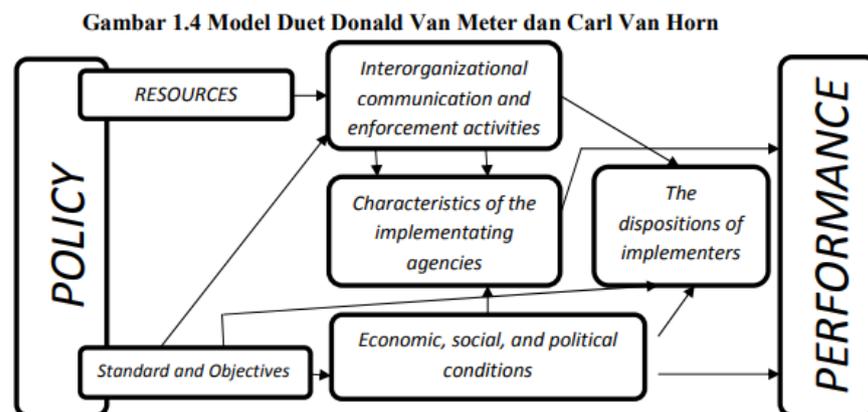
Implementasi merupakan bagian dari pelaksanaan keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha menjadi tindakan oprasional untuk mencapai perubahan yang besar oleh organisasi publik agar di arahkan menjadi tujuan dan sasaran. Adapun tujuan dari implementasi kebijakan ialah merealisasikan jaringan dari intansi pemerintah dengan kebutuhan masyarakat dengan berbagai kepentingan. Van Meter dan Van Horn memiliki model implementasi kebijakan publik yang menyelaraskan kebijakan secara linier dari keputusan, pelaksana, dan kinerja politik yang di sebut dalam *A model of policy*. Pada pelaksanaan kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn, dilangsungkan dengan beberapa faktor yang menegaskan standar beserta sasaran untuk di capai oleh pelaksana kebijakan.

Van Meter dan Van Horn memandang implementasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dari suatu model konseptual yang mengaitkan kebijakann dengan prestasi kerja. Mereka menegaskan bahwa perubahan, pengendalian dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang penting dalam prosedur implementasi. Terdapat beberapa hal yang memepengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (Aneta, 2010):

- a. Aktivitas pelaksanaan kebijakan publik yang menyertakan komunikasi terhadap instansi atau organisasi.
- b. Karakteristik dari pelaksana kebijakan
- c. Kondisi ekonomi, politik, dan sosial
- d. Kecenderungan dari pelaksana kebijakan

Untuk menganalisis suatu proses implementasi kebijakan itu berlangsung, dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:109-124) mengajukan model mengenai proses implementasi kebijakan. Dalam model ini Van Meter dan Van Horn mendasarkan pada argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Kemudian ditegaskan pula bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang sangat penting dalam prosedur implementasi.

Berikut ialah model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.



*Sumber: Riant Nugroho, Public Policy (2011:684)*

Van Meter dan Van Horn memiliki model implementasi kebijakan yang dapat di laksanakan secara linier yang di pengaruhi oleh beberapa hal seperti sumber daya, karakteristik implementor, komunikasi antar organisasi, lingkungan, dan sikap pelaksana.

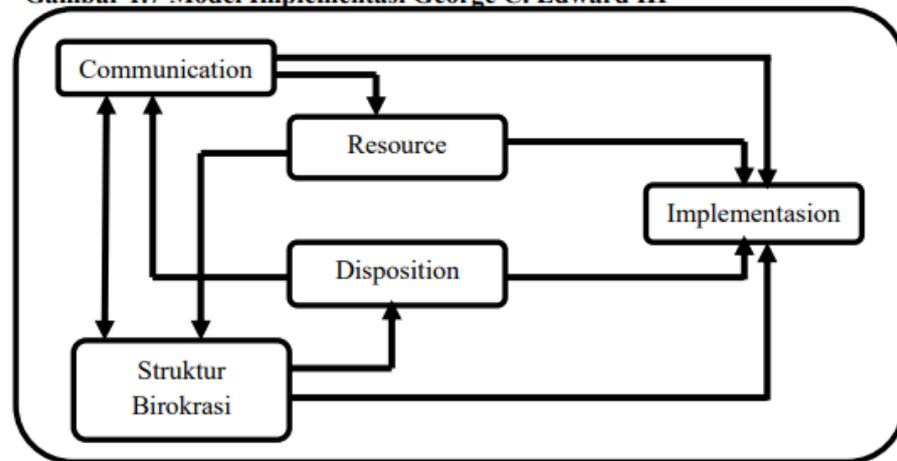
Pada dasarnya implementasi kebijakan tidak hanya berprinsip dengan proses pelaksanaannya, akan tetapi juga terkait dengan tindakan individu, pemerintah, dan swasta agar bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan atau program sehingga tercapai tujuan yang memiliki kekuatan politik, sosial, dan ekonomi. Dengan begitu implementasi kebijakan akan menimbulkan dampak dari apa yang telah di laksanakan oleh implementor. Pada konsep ini ia juga menegaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

## 2. Teori Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

Menurut Edward III, implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya sebagai bagian utama dari pelaksanaan kebijakan publik yang di pengaruhi oleh sumber daya pegawai instansi dalam melaksanakan kebijakan melalui informasi yang menyangkut dengan peraturan atau regulasi pada pelaksanaan kebijakan publik agar terlaksana secara efektif dari kewenangan yang di miliki oleh implementor. Selain itu, implementasi kebijakan juga memerlukan sarana dan prasarana agar pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan dan sasaran (Hasibuan, Yusnadi , & Purba , 2016). Implementasi di pandang krusial bagi pelaksana kebijakan publik sebab terdapat beberapa faktor keberhasilan dari implementasi yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Edwards III memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Apabila terdapat faktor atau indikator yang tidak di laksanakan, maka dapat menghambat implementasi dari kebijakan publik (Aneta, 2010).

Berikut ialah model dari teori implementasi kebijakan menurut Edward III :

Gambar 1.7 Model Implementasi George C. Edward III



<http://arenakami.blogspot.com/2012/06/implementasi-kebijakan-george-edward.html>

Sama seperti halnya model teori Van Meter dan Van Horn, teori Implementasi Kebijakan Edward III juga mengarah terhadap sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, juga disposisi. Berikut ialah uraian menurut Edward III mengenai implementasi kebijakan :

a. Sumber Daya Manusia

Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan di pengaruhi oleh SDM yang unggul sebab dengan kualitas SDM dapat pula menimbulkan kualitas terhadap pelayanan yang di berikan. Sementara kegagalan dari implementasi kebijakan ialah sebab terbatasnya insentif atau anggaran yang di berikan terhadap implementor karena hal tersebut mempengaruhi kinerja pegawai dalam melaksanakan kebijakan.

b. Komunikasi

Pelaksanaan kebijakan juga harus diiringi dengan komunikasi yang baik agar implementor dapat saling bekerja sama dan mengetahui tugas dan fungsi yang harus mereka siapkan dan laksanakan agar sesuai harapan. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2014: 150- 151) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu: 1) Transmisi,

penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu salah satunya adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui didalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidori di tengah jalan. 2) Kejelasan, komunikasi yang di terima oleh pelaksana kebijakan (street-level bureaucrats) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). 3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau di jalankan. Jika perintah yang di berikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

c. Struktur Birokrasi

Efisiensi dari struktur birokrasi juga dapat mempengaruhi aspek organisasi dalam melaksanakan kebijakan sebab struktur lekat kaitannya dengan kewenangan, hubungan antar unit, dan lain-lain. Terdapat dua karakteristik dari struktur organisasi yakni SOP dan fragmentasi. SOP juga tidak menutup kemungkinan dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Edward III juga menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”

d. Disposisi

Disposisi ialah sikap pelaksana yang mampu mengakibatkan hambatan dalam mengimplementasi kebijakan apabila terdapat pelaksanaan kebijakan yang tidak di

inginkan oleh pihak atasan. Oleh sebab itu, pemilihan pada pelaksana kebijakan harus memiliki dedikasi terhadap kepentingan publik sebagai salah satu latar belakang pelaksanaan kebijakan. Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Faktor-faktor yang selalu menjadi perhatian utama Edward III didalam Agustino (2006:152-153) mengenai bagaimana disposisi yang dalam implementasi kebijakan terdiri dari: 1. Pengangkatan birokrat. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakankebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang bisa memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga. 2. Insentif, Edward menyatakan ini bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk dapat mengatasi masalah tentang kecendrungan para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang-orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Maka Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya didalam memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

### 3. Konsep Implementasi Kebijakan Menurut Charles Jones

Implementasi kebijakan menurut Jones (1984 : 12) "*getting the job done and doing it*". Pengertian ini merupakan pengertian yang sederhana, tetapi tidak berarti bahwa

implementasi merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilaksanakan dengan mudah. Dalam pelaksanaannya, menurut Jones menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional. Implementasi kebijakan publik menekankan pada tindakan baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu, kelompok atau pihak swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya juga mengukur akan keberhasilan atau kegagalan suatu hasil kebijakan yang secara nyata dilaksanakan dilapangan oleh para implementator dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat maupun stakeholdernya. Implementasi juga dapat di tunjukkan dari beberapa kegiatan yang di tujukan untuk pelaksanaan dan pengelolaan suatu kebijakan atau program yang berdasarkan aktivitas berupa (Aneta, 2010) :

- a. Pembentukan sumber daya, unit, dan metode penunjang.
- b. Intepretasi dari perencanaan terhadap pengarahan dan pelaksanaan yang di terima dan di laksanakan.
- c. Penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penyediaan barang serta jasa.

Dari berbagai aktivitas diatas, implementor juga harus menanggapi segala upaya yang harus dilakukan dari masalah yang timbul. Pelaksanaan kebijakan dapat di tekankan melalui kejelasan, presisi, konsistensi, prioritas, dan sumber daya yang memadai. Implementasi kebijakan juga harus di padukan oleh panduan dan pengelolaan agar berjalan efektif dan efisien (Permatasari, 2015) .

Menurut Charles O. Jones kebijakan publik merupakan kebijakan yang digunakan dalam praktek sehari-hari. Namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Charles Jones menganalisis masalah implementasi kebijakan dengan cara yang skematis, dengan mendasarkan pada konsep aktivitas-aktivitas fungsional.

Dijelaskan bahwa menurut Jones dalam mengimplementasikan kebijakan dituntut adanya syarat-syarat antara lain, adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan operasional. Oleh karena itu, lebih lanjut Jones merumuskan batasan implementasi sebagai "*a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done*". Mengemukakan beberapa dimensi dari pelaksanaan pemerintah mengenai program-program yang disahkan, kemudian menentukan implementasinya.

Dalam teori ini, terdapat tiga aktivitas utama sebagai faktor pendukung model implementasi kebijakan publik, yakni :

#### 1) Organisasi

Organisasi, merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit metode untuk menjadikan program berjalan (restrukturisasi sumber daya, pembentukan unit, dan metode untuk pelaksanaan program). Aktivitas pengorganisasian (organization) merupakan suatu upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil (outcome) sesuai dengan sasaran kebijakan.

#### 2) Interpretasi

Interpretasi bertujuan untuk menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan (merancang program kedalam rencana dan tindakan yang dapat diterima dan dilaksanakan). Interpretasi (interpretation) merupakan aktivitas yang juga menjelaskan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan.

#### 3) Penerapan

Kebutuhan rutin dari pelayanan pembayaran atau lainnya, yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (dukungan pendanaan dan lain-lain sesuai tujuan program). Penerapan aktivitas penyediaan sarana dapat dilaksanakan secara rutin melalui pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada. Dengan demikian implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Bertumpu pada aktivitas yang dikemukakan Charles O. Jones tersebut, maka masalah implementasi kebijakan publik semakin lebih jelas dan luas, dimana implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis yang terdiri dari organisasi, interpretasi dan aplikasi.

#### c. Indikator Implementasi Kebijakan

Dalam penelitian ini menggunakan model implementasi oleh Goerge Edward. Menurut model Edward III, terdapat beberapa indikator implementasi kebijakan, yakni (Mulyadi, 2016) :

##### 1) Komunikasi

Suatu implementasi akan berjalan lancar apabila tujuan alam kebijakan tersebut dipahami oleh individunya. Oleh karena itu pentingnya komunikasi terbangun secara tepat dengan para pelaksananya. Pentingnya men sosialisasi-kan tujuan dan program kebijakan secara baik, untuk menghindari distorsi atas kebijakan atau program. Pentingnya Men-Sosialisasi-kan tujuan dan program kebijakan secara baik, untuk menghindari distorsi atas kebijakan atau program (Mulyadi, 2016).

##### 2) Sumber daya

Salah satu hal yang paling mempengaruhi pengimplementasian suatu program ialah ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun financial. Komponen sumber daya tersebut meliputi ketersediaan staf ahli, adanya kewenangan yang

menjamin program akan diarahkan sesuai dengan yang diharapkan, serta fasilitas pendukung yang digunakan untuk kegiatan program (Mulyadi, 2016).

3) Disposisi atau sikap pelaksana

Salah satu yang mempengaruhi efektifitas implementasi suatu program ialah sikap implementatornya. Implementator harus memiliki komitmen yang tinggi dan jujur terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. Sikap yang demokratis, yang harus dimiliki oleh para implementator, yang bertujuan untuk menurunkan resistensi masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementator dan program/kebijakan (Mulyadi, 2016).

4) Struktur birokrasi

Jika membahas mengenai pelaksanaan suatu program maka tidak lepas dari struktur birokrasinya. Mekanisme implementasi program yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan dan disertai kerangka SOP yang sistematis, jelas dan dapat dipahami semua orang. Struktur birokrasi yang ringkas, cepat dan fleksibel, yang bertujuan untuk menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

5) KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)

a. Pengertian KBM

Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu aktivitas pendidikan berupa pembagian informasi yang dilakukan oleh pihak pengajar terhadap anak didiknya guna meningkatkan pengetahuan akademis dan non akademis yang didapatkan di jenjang pendidikan sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan (Supriono, 2011). Menurut Hamdani (2011), belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individual untuk mengetahui suatu hal dari kondisi tertentu sehingga mampu pemikiran dan tindakan yang kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan pembelajaran. Sementara itu, mengajar ialah usaha yang dilaksanakan untuk memberikan bantuan pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik agar

tercipta interaksi sosial di lingkup pendidikan. Sikap dari program ini sangatlah mempengaruhi karakter dan sikap pelaksana kegiatan melalui model pengajaran yang di terapkan yakni diskusi, demonstrasi, simulasi, dan kooperatif (Huda, 2011).

Pelaksanaan pendidikan seperti KBM dapat di praktekkan dengan dua cara, yakni pembelajaran langsung atau bahkan daring. Pembelajaran secara daring di tujukan agar dapat di laksanakan oleh seluruh kalangan di manapun dan kapanpun tanpa harus melangsungkan tatap muka. Menurut Noor (2017), pembelajaran jarak jauh dapat mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar pada kondisi darurat. Hal tersebut di karenakan sistem KBM dapat dilakanakan secara kondisional dengan memanfaatkan teknologi digital.

#### b. Tipologi KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)

Setiap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan, setiap pendidik memiliki tipe atau gaya KBM yang di terapkan kepada anak didiknya. Adapun tipologi dari kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan dapat di jabarkan dalam beberapa gaya seperti halnya (Deporter & Hernacki, 2015) :

##### 1. Tipe Visual (Tatap Muka)

Tipe ini merupakan gaya pembelajaran yang mengandalkan kegiatan tatap muka yang di saksikan langsung oleh pendidik dan peserta didik melalui proses mengamati, melihat, dan membaca sehingga tercipta interaksi langsung di suatu dengan media grafis, ilustrasi, dan catatan yang di beri pendidik untuk mempermudah murid memahami pengetahuan yang ia berikan.

##### 2. Tipe Audhitory (Tanpa Tatap Muka)

Tipe ini di biasanya berfokus pada suara yang di berikan tenaga didik terhadap peserta didik dalam pelaksnaaan kegiatan belajar mengajar. Tipe pembelajaran dengan gaya ini tidak harus dilaksanakan secara tatap muka langsung id suatu tempat, akan tetapi dapat di laksanakan dari jarak jauh melalui bantuan alat digital. Meski berfokus pada suara, akan

tetapi tipe ini sudah memiliki kecanggihan yang dapat di laksanakan secara visual dan auditory guna mempermudah murid dalam memahami ilmu yang di berikan oleh pendidik sebab terdapat metode yang harus di lihat secara visual meski tidak bertatap muka secara langsung.

c. Indikator KBM (Kegiatan Belajar Mengajar)

Pelaksanaan KBM membutuhkan indikator dalam pencapaiannya sebagai tolok ukur untuk mencapai keberhasilan. Selai itu, melalui indikator ini, dapat pula mempermudah untuk mengalisis perbaikan yang harus dilakukan apabila terjadi kegagalan dalam kegiatan KBM. Menurut Wibowo (2016), terdapat beberapa indikator untuk mencapai kegiatan belajar mengajar yang efektif sekaligus sebagai bahan pertimbangan atas penilaian kegiatan tersebut yang tersusun dalam beberapa aspek, yakni :

1. Guru atau Pendidik

Sebagai bagian dari agen pendidikan, seorang guru sudahseharusnya memiliki kemampuan untuk mendidik dan mengajarkan kepada peserta didik perihal pengetahuan yang mereka miliki yang dapat di tuangkan kedalam teori atau bahkan tindakan agar mereka mendapatkan pengegtahuan yang layak untuk di terima. Selain itu, pendidik juga merupakan kunci dari keberhasilan siswa dalam mengembangkan kompetensi dan potensi yang mereka miliki melalui dukungan moril atau bahkan pelaksanaan latihan belajar di sekolah atau di rumah sehingga mereka dapat memperdalam pengetahuan dan kemampuan yang mereka miliki dari bimbingan yang di berikan di tempat pendidikan yang mereka tempuh.

2. Keaktifan Peserta Didik

Keaktifan peserta didik dalam menempuh kegiatan pendidikan juga mampu mempengaruhi kegiatan belajar dan mengajar yang mereka lakukan selama di bangku sekolah. Dari pengetahuan yang telah di berikan oleh pendidik, alangkah baiknya jika

peserta didik mengimplementasikannya berdasarkan kreatifitas dan inovasi yang di miliki. Peserta didik yang aktif akan membuka kemudahan dalam menyerap pengetahuan akademis dibanding mereka yang bersikap pasif sebab kemampuan peserat didik dalam berpikir kritis mampu mengasah pikiran dan tindakan yang akan mereka perbuat nantinya. Oleh karena itu, keaktifan siswa sudah selayaknya tertanam di dalam diri mereka masing-masing agar mempermudah eksplorasi hal-hal yang baru. Keaktifan siswa dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam memanfaatkan peluang di suatu situasi dna kondisi dengan melatih kemampuan secara individual.

### 3. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di dunia pendidikan dapat berjalan dengan baik apabila memiliki sarana dan prasarana yang baik. Kedua aspek ini dapat di kemas dalam ketersediaan fasilitas tempat pendidikan. Apabila terdapat fasilitas yang memumpuni maka akan memudahkan jalannya KBM yang efektif.

### 4. Metode dan Media Pembelajaran

Metode dan media pembelajaran mampu membawa sistem kegiatan belajar mengajar terhadap kualitas pendidikan yang di berikan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik agar lebih efektif dan efisien. Tidak hanya itu, dengan metode pemanfaatan media pembelajaran mampu membawa pembaruan sistem KBM agar tidak terlalu monoton sehingga pelaksana kegiatan memiliki kemudahan dalam memberikan dan menyerap pembelajaran serta menekan rasa kebosanan dalam kegiatan KBM.

## **G. Definisi Konseptual**

### 1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah suatu rangkaian peraturan yang di bentuk oleh pejabat publik sebagai suatu langkah alternatif terhadap lingkungan yang di kelola dalam menghadapi,

mengantisipasi, dan menyelesaikan permasalahan di dalam suatu negara atau daerah layaknya solusi dari permasalahan tersebut. Adapun pedoman dari pelaksanaan kebijakan publik ialah Kebijakan harus dibedakan dari keputusannya, administrasinya, harapan dan perilaku, hasil akhir yang ingin dicapai, dan tujuan tertentu yang tertera secara eksplisit maupun implisit.

## 2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan pelaksanaan peraturan oleh pemerintah atau seperangkat organisasi pemerintah terhadap permasalahan atau isu publik yang sebelumnya telah di rancang melalui kebijakan guna kepentingan umum sehingga memiliki dampak kedepannya atau mencapai tujuan yang ada. Pelaksanaan implementasi program ini dapat di lakukan dengan dua metode, yakni : *Pertama*, di laksanakan dalam bentuk program. *Kedua*, melalui turunan dari kebijakan publik yang telah di bentuk sebelumnya.

## 3. KBM (Kegiatan belajar mengajar)

KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) ialah suatu aktivitas pendidikan yang dilaksanakan dengan pembagian informasi yang di lakukan oleh pihak pengajar terhadap anak didiknya guna meningkatkan pengetahuan akademis dan non akademis yang di dapatkan di jenjang pendidikan.

## H. Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Implementasi	a. Komunikasi	a. Tujuan pelaksanaan pendidikan secara daring b. Sasaran dari pelaksanaan

		<p>pendidikan secara KBM daring yakni terhadap tenaga didik dan peserta didik</p> <p>c. Upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan KBM daring yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik</p>
	b. Sumber daya	<p>a. Ketersediaan pelaksana pendidikan dari suatu kebijakan</p> <p>b. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksana KBM</p>
	c. Disposisi	<p>a. Sikap pelaksana kebijakan yang di alokasikan terhadap keberadaan KBM</p> <p>b. Tindakan pelaksana KBM yang di perlukan</p>
	d. Struktur birokrasi	<p>a. SOP dari KBM yang di</p>

		<p>laksanakan secara daring</p> <p>b. Mekanisme KBM daring yang di butuhkan agar implementasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran</p>
--	--	---

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan proposal penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan sifat dari fenomena serta gejala yang membahas tentang perkembangan hubungan objek penelitian dengan aspek sosial di masyarakat (Surachmad, 1982). Metode ini memiliki karakteristik yang membutuhkan konsentrasi pada penyusunan masalah di penulisan dengan menyertakan pengumpulan data yang diatur, dijelaskan, dan dianalisis secara intensif dan terperinci (Nurmandi & Purnomo, 2011). Manfaat analisis kualitatif bertujuan agar dapat memahami, memaknai, dan mendefinisikan hubungan perbandingan antar gejala sosial yang saling berhubungan (Martono, 2011).

### 2. Lokasi Penelitian

SMA Negeri 1 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah yang telah berdiri sejak tahun 1954. Pada tahun tersebut kepala bidang Pendidikan menugaskan kepada beberapa SMA untuk merubah kurikulum belajar mereka yang dimana nanti sekolah sekolah tersebut

diberi nama SMA Teladan. SMA ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Yogyakarta, dan Bukit Tinggi melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12807/A/C tahun 1957. SMA Teladan ini terdiri dari 3 bagian yaitu A berisi sastra budaya, B ilmu eksak/ IPA, C berisi ilmu sosial dan ekonomi. Sebelumnya Lembaga ini bernama AMS (Algerne Midlebaar School) Afdelling Yogyakarta. SMA 1 Yogyakarta merupakan SMA Teladan bagian A sebelumnya, karena system percobaan ini berhasil maka SMA Teladan ABC digabung menjadi 1 yaitu SMA Negeri 1 Yogyakarta pertanggal 30 November 1962 dengan di tetapkan SK Mendikbud Nomor 34/SK/BIII (Wahyudi, 2018).

Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.11, Tegal Panggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kode Pos 55212. Peneliti memilih lokasi tersebut sebab Dinas Pendidikan ialah suatu instansi yang mengatur tentang kebijakan pendidikan sehingga terbentuk program yang di laksanakan. Sedangkan alasan lain bagi peneliti untuk memilih Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian di sebabkan masih banyaknya pelajar atau peserta didik yang mengalami hambatan pembelajaran secara daring di Kota Yogyakarta meski kota ini terbilang sebagai kota pelajar namun kesulitan sistem pembelajaran ternyata masih memelihara hambatan yang kurang di perhatikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta akibat berlakunya “belajar dari rumah” di saat masa Pandemi COVID-19.

### 3. Unit Analisis

Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data dan sumber informasi dari :

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
- b. Humas Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
- c. Guru SMAN 1 Yogyakarta
- d. Siswa SMAN 1 Yogyakarta

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Penulis menggunakan data primer yang di dapatkan melalui hasil wawancara di kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang diperoleh dari responden agar penulis mendapatkan data akurat mengenai pelaksanaan program KBM secara daring untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai implementasi kebijakan dari Kementerian Pendidikan yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta sebagai salah satu penanganan wabah COVID-19 melalui pembelajaran daring. Selain melakukan wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan, peneliti juga melakukan wawancara dengan guru dan beberapa siswa SMA N 1 Yogyakarta sebagai data pendukung penelitian ini. Tujuan wawancara agar data yang didapatkan akurat dan dapat di pertanggung jawabkan. Selain itu penulis juga mampu mengulik perihal pola pikir dan tindakan yang akan di lakukan pemerintah terhadap pelajar kedepannya dalam implementasi kebijakan mengenai KBM daring dalam menekan kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta.

##### b. Data Sekunder

Pada penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu seperti jurnal dan prosiding seminar nasional mengenai implementasi program KBM melalui daring sebagai bantuan acuan data dalam penelitian ini. Selain melalui penelitian terdahulu, penulis juga menggunakan sumber berita online dan website resmi pemerintahan untuk mendapatkan data yang spesifik mengenai implementasi kebijakan dari Surat Edaran Kementerian Pendidikan Nomor 4 Tahun 2020 di Kota Yogyakarta sebagai landasan kebijakan pelaksanaan KBM di masa Pandemi COVID-19.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai penelitian yang di dapatkan melalui beberapa sumber, maka penulis akan menganalisis tema tersebut dengan logika yang relevan serta di imbangi fakta yang akurat agar mempermudah dalam melakukan analisa dan pembahasan dalam penelitian ini, sehingga

melahirkan penelitian yang tidak sama seperti penelitian sebelumnya, Oleh karena itu, peneliti mendapatkan prosedur penelitian sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara menjadi penting dalam sebuah penelitian kualitatif karena akan menggali informasi yang di transformasikan dalam bentuk kata-kata. Wawancara merupakan suatu percakapan dengan memiliki tujuan tertentu yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai penanya dan pihak yang diwawancarai (narasumber) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan (Putra, 2018). Adapun dalam tahap wawancara, narasumber yang peneliti pilih antara lain sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
2. Humas Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
3. Guru SMAN 1 Kota Yogyakarta
4. Siswa SMA N 1 Yogyakarta

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menyelidiki data seperti dari dokumen-dokumen, catatan, berita, file, atau hal-hal lain yang sudah di dokumentasikan agar terdapat fakta dan data yang di peroleh saat pelaksanaan wawancara atau dari media lainnya (Djaelani, 2013). Studi dokumentasi yang dilaksanakan oleh peneliti ialah melalui data-data tertulis yang diberikan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta untuk penunjang penelitian ini.

c. Observasi

Penulis melakukan kedatangan langsung ke beberapa daerah di Yogyakarta untuk mendapatkan fakta dan data secara langsung dari penerima program sehingga dapat

mengetahui sejauh mana efektifitas program tersebut berjalan. Dari sinilah dapat di lihat apakah seluruh masyarakat memiliki respon yang positif atau bahkan negatif dari pencapaian program yang di hasilkan. Peneliti melaksanakan observasi ke Kantor Dinas Pendidikan untuk memperoleh data mengenai bagaimana pelaksanaan program KBM secara daring dimasa Pandemi COVID-19, selain itu peneliti juga melaksanakan observasi ke SMAN 1 Yogyakarta sebagai lokus penelitian ini.

## 6. Teknik Analisa Data

Menurut Hadi (1986), teknik analisa data yang di gunakan pada penelitian kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara, survey, dan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya guna mendapatkan data-data terdahulu agar mempermudah peneliti dalam membandingkan dan menganalisis data yang ada menjadi suatu pembahasan yang menarik. Akan tetapi pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu dalam pencarian data sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang kemudian di kaji secara rinci ke dalam pembahasan guna mendapatkan kajian yang menarik. Adapun teknik lain yang dapat di gunakan dalam analisis data pada penelitian ini ialah teknik triangulasi yang memiliki sistem analisa data berupa :

### a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyaringan data-data kasar yang di temukan oleh peneliti baik di lapangan ataupun melalui penelitian sebelumnya agar memudahkan penulis dalam melakukan ringkasan dan pelaksanaan analisis sehingga penulis mendapatkan data akurat yang pantas untuk di tampilkan dalam penelitian ini. Bentuk analisis ini mampu menajamkan , menggolongkan, memilah sedemikian rupa untuk mendapatkan penarikan hasil yang dapat diverifikasi. Data kualitatif yang di hasilkan dari reduksi ini akan lebih mudah untuk disederhanakan dan transformasikan melalui berbagai macam cara, yaitu :

seleksi, penggolongan, ringkasan agar mendapatkan hasil yang singkat dengan satu pola yang luas.

b. Penyajian data

Setelah peneliti mengumpulkan data dan menyeleksi data yang di dapatkan, maka penulis melakukan penyajian data sesuai dengan kebutuhan penelitian agar tidak menampilkan kelebihan data yang mampu menimbulkan kerumitan analisa atau bahkan kekurangan data yang menyebabkan kurang relevan dan akuratnya penelitian tersebut sebab minimnya fakta di lapangan.

c. Matriks kesimpulan

Matrik kesimpulan merupakan penarikan benang merah yang penulis dapatkan dari perolehan data. Pada tahap ini penulis dapat membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang dapat menunjang permasalahan dalam penelitian ini mengingat terdapat beberapa rumusan masalah yang harus di selesaikan melalui pencarian jalan keluar dari hal-hal yang di jadikan perhatian dalam penelitian ini.

